

Larangan Ekspor Minyak Goreng untuk Kepentingan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah memutuskan melarang ekspor minyak goreng demi kepentingan nasional dan masyarakat.

"Sudah menjadi keputusan di sidang kabinet. Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/4).

Ma'ruf menuturkan, kebijakan itu merupakan langkah nyata yang diambil pemerintah untuk segera menstabilkan harga minyak yang sempat melambung dan langkah beberapa waktu terakhir. Pemerintah pun akan mengevaluasi kebijakan ini secara berkala supaya keputusan yang diambil akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

"Pemerintah akan melihat. Ya kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian

akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock therapy itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melarang ekspor minyak goreng mulai Kamis (28/4) untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Kebijakan itu diambil berdasarkan hasil rapat mengenai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat jelang Lebaran 2022, terutama mengenai ketersediaan minyak goreng di Indonesia.

"Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian," ujar Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4) lalu. ● **han**

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

Ketiga tersangka yakni, Ardius Prihantono (AP) menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian dua dari pihak swasta, yakni Agus Kartono (AK) dan Farid Nurdiansyah (FN).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

"Dari berbagai sumber informasi maupun data kemudian ditemukanlah adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada Agustus 2021," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Sebentanya ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2021

lalu. Namun demikian, KPK baru mengumumkan secara resmi nama-nama para tersangka tersebut pada, Selasa (26/4). Hal itu dilakukan sejalan dengan adanya proses penahanan.

Bahkan, tim penyidik juga sudah melakukan serangkaian pengeledahan di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Serang Banten, dan Bogor, terkait penyidikan perkara ini. Adapun, lokasi yang telah dikeledah diantaranya yaitu, rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang terkait dengan perkara ini.

Tim mengamankan sejumlah dokumen barang elektronik, hingga dua unit mobil usai menggeledah sejumlah lokasi tersebut. KPK masih menganalisa lebih jauh dua unit mobil serta dokumen-dokumen yang diamankan tersebut guna proses penyitaan.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ● **mei**

Polhukam

FOTO/ANT



Ketua KPK Soroti Dana Sponsor Pemilu, Sebab Ada Timbal Balik di Dalamnya

Ketua KPK Firlil Bahuri mengatakan, para pemilik dana rela mensponsori calon yang bakal ikut Pemilu maupun Pilkada karena ada timbal balik ketika kandidatnya terpilih.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firlil Bahuri menyoroti permasalahan dana sponsor yang kerap muncul di Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dana sponsor, kata Firlil, muncul karena biaya politik untuk mengikuti kontestasi di Pemilu atau

Pilkada yang terlampau mahal. Demikian diungkapkan Firlil saat menghadiri rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Lampung pada 25 sampai 28 April 2022. Di mana, rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Inspektorat Kabupaten/Kota

se-Provinsi Lampung.

"Setiap orang yang ingin mengikuti pemilu/pilkada justru butuh biaya mahal. Harus menyiapkan biaya lebih untuk pencalonannya, meski sering pula dibiayai oleh sponsor," kata Firlil melalui keterangan resminya, Selasa (26/4).

Menurut Firlil, para pemilik dana rela memberikan uangnya sebagai sponsor kepada para calon yang bakal mengikuti Pemilu maupun Pilkada karena ada timbal balik ketika kandidatnya terpilih. Oleh karena itu, tak sedikit para kepala daerah yang ketika menjabat masih mempunyai utang kepada para pengusaha.

"Sehingga kepala daerah tersebut seperti 'membayar utang' pemilihan dengan menggunakan uang yang sumbernya dari APBD atau APBN," kata Firlil.

Tak hanya itu, kata Firlil, DPRD juga biasanya kerap meminta "uang jasa" kepada kepala daerah saat dalam pembahasan anggaran. Kemudian, kepala daerah melalui sekretaris daerah meminta uang kepada kepala dinas; lalu kepala dinas meminta uang kepada orang-orang seperti lingkar, terus berlanjut tidak terputus.

"Ini fakta yang terjadi di lapangan. Untuk itu, KPK mendalami mengapa korupsi masih ada. Apakah pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum efektif. Bagaimana pengawasannya, bagaimana punishment, apakah menimbulkan efek jera, dan bagaimana sistem serta regulasinya. Apakah masih ada celah korupsinya," tegas Firlil.

Firlil melihat korupsi bisa terjadi di segala sektor kehidupan. Mulai dari korupsi pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga saat pemilihan kepala daerah. Di mana, praktik korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia yakni suap dan gratifikasi.

Penyebabnya, kata Firlil, adalah banyak masyarakat yang tidak tahu. Di mana, ketika menerima gratifikasi atau suap justru masih dianggap sebagai suatu rejeki. Oleh karenanya, Firlil menilai peran pencegahan harus lebih diefektifkan melalui sosialisasi nilai-nilai antikorupsi.

"Oleh karenanya KPK selalu berupaya bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendidikan antikorupsi sejak dini, hingga ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran supaya tidak korupsi," tandasnya. ● **han**

MRP Pertanyakan Klaim Mahfud soal 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal 82 persen masyarakat Papua setuju pemekaran wilayah.

"Majelis Rakyat Papua mempertanyakan penyampaian dari Bapak Menko Polhukam terkait dengan 82 persen aspirasi. Ini kajian dari mana, kajian kapan dilakukan, dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi?" kata Timotius di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/4).

Timotius mengatakan,

pemerintah semestinya mendengar aspirasi MRP yang menolak pemekaran wilayah. Sebab, MRP adalah lembaga resmi yang ada di daerah sebagai perwakilan rakyat Papua. "Pemerintah pusat sesungguhnya harus mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami adalah lembaga negara yang ada di daerah yang menyampaikan aspirasi masyarakat Papua," kata Timotius.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang mendampingi Timotius menambahkan, klaim 82 persen masyarakat Papua ingin pemekaran wilayah itu juga disam-

paikan saat MRP bertemu Presiden Joko Widodo pada Senin (25/4) kemarin.

Tetapi, hal itu baru disebut di ujung pertemuan, sehingga pihaknya tidak bisa meminta penjelasan lebih jauh kepada pemerintah mengenai klaim tersebut.

"Kita tidak bisa mempersoalkan lagi karena waktu sudah habis, disebut begitu saja, tidak disebut apakah survei Indikator, SMRC atau kapan dilakukannya, berapa responden, di kabupaten Papua yang mana, tidak ada," ujar Usman.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, sebanyak 82 persen rakyat Papua ingin agar ada pemekaran. Hal itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan. "Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran. Minta mekar," ujar Mahfud dalam keterangan persnya usai mengikuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka pada Senin (25/4). ● **han**

KPK Tunda Pemeriksaan Boyamin Saiman Terkait Kasus Korupsi Bupati Budhi Sarwono

JAKARTA (IM) - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/4) siang untuk memenuhi undangan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Boyamin yang juga Direktur PT Bumi Rejo itu bersedia bakal diperiksa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Namun, pemeriksaan terhadap Boyamin batal dilakukan karena tim penyidik dari

kasus itu berada di luar kota.

"Ditunda habis Lebaran, tetapi saya tetap mengajukan besok saya ke sini lagi, mudah-mudahan dikabulkanlah, karena penyidiknya (sedang) keluar kota hari ini," ujar Boyamin ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/4).

Kepada awak media, Boyamin mengaku menjabat sebagai Direktur PT Bumi Rejo sejak tahun 2018. Ia masuk ke perusahaan itu untuk membantu mengurus utang di beberapa bank.

"Saya masuk PT bumi Redjo itu 2018, secara formalnya begitu. Terus 2014 kredit macet di banyak bank, invalid, maka diambil alih semuanya oleh orangtuanya (Budhi Sarwono) karena pemegang saham itu namanya Pak Sugeng Budhiarto," papar Boyamin.

"Setelah kreditanya macet di Bank Mandiri, BPD, perusahaan Bumi Rejo itu kondisinya invalid, tidak bisa ikut tender lagi sejak tahun 2014, terus 2018 saya dimasukkan menjadi direktur, tugas saya adalah mengurus utang dan piutang," katanya.

Sebelumnya, KPK menyatakan telah mengirimkan surat kepada Boyamin pada Kamis (21/4) untuk diperiksa pada Senin (25/4). Namun, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa Koordinator MAKI itu tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. ● **mei**



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT. BANK SINARMAS Tbk.

Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.03/2010, dengan ini PT. Bank Sinarmas Tbk, mengumumkan Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagai berikut:

Tahun 2021 Rp. 651.734.586.738,-

Rincian Daftar Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah sebagaimana tercantor di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersama dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.



PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk A Multifinance Company

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta - 12190,
Telp. (021) 51401157, Fax. (021) 51401159,
Email : danasupra@cbn.net.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas dan Setor	16.159.662.034	6.563.110.031
Piutang Pembayaran Konsumen-neto	12.218.081.881	13.857.545.670
Tagihan Anjak Piutang-neto	19.800.000.000	19.800.000.000
Biaya Dibayar Dimuka	163.815.507	62.214.957
Piutang Lain-Lain	2.078.271.772	3.102.853.892
Investasi Efek Tersedia untuk Dijual	22.985.070.000	39.051.600.000
Aset Tetap		
Harga Perolehan	692.952.822	689.144.802
Akumulasi Penyusutan	(672.916.309)	(627.152.336)
Aset Pajak Tangguhan	-	447.792.237
Aset Lain-Lain	84.705.784	84.705.784
JUMLAH ASET	73.509.643.291	83.031.815.037
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang Lain-Lain	203.430.569	243.920.519
Beban Masih Harus Dibayar	16.399.822	20.437.822
Utang Pajak	14.263.978	23.005.922
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Karyawan	546.391.061	296.492.581
Jumlah Liabilitas	780.485.430	583.856.844
EKUITAS		
Modal Saham		
nilai nominal Rp. 50 per saham		
Modal dasar		
- 2.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	33.800.000.000	33.800.000.000
- 678.000.000 saham	(202.810.333)	(202.810.333)
Modal disetor lainnya	19.799.191.172	19.799.191.172
Ekuitas lainnya		
Saldo Laba	2.450.000.000	2.450.000.000
- Telah Ditentukan Penggunaannya	41.238.714.082	44.939.909.072
- Belum Ditentukan Penggunaannya (Rugi) Laba Komprehensif Lainnya	(24.355.937.060)	(18.338.331.718)
Jumlah Ekuitas	72.729.157.861	82.447.958.193
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.509.643.291	83.031.815.037

Catatan:
• Laporan Keuangan untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan dengan opini tidak menyatakan pendapat.

Jakarta, 27 April 2022

Direksi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)			
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	
PENDAPATAN			
Anjak Piutang	1.102.253.768	1.139.838.499	
Anjak Piutang	825.665.383	1.422.627.527	
Lain-lain - bersih	407.313.632	678.018.212	
JUMLAH	2.335.232.783	3.240.484.238	
BEBAN			
Umum dan Administrasi	5.224.089.280	3.915.232.979	
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan			
Kerugian Penurunan Nilai Piutang	1.331.978.394	898.276.649	
JUMLAH	6.556.067.674	4.813.509.628	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(4.220.834.891)	(1.573.025.390)	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Tanggung	(422.745.599)	313.979.918	
LABA TAHUN BERJALAN	(4.643.580.490)	(1.259.045.472)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas			
Liabilitas Imbalan Kerja	(50.293.704)	4.803.291	
Kerugian Belum Terealisasi atas Investasi	(13.160.215.000)	(29.439.620.000)	
Tersedia Untuk Dijual			
Keuntungan Terealisasi atas penjualan investasi	8.160.335.500	(1.056.724)	
efek tersedia Untuk Dijual	(25.046.638)	(1.056.724)	
Pajak Penghasilan	(5.075.219.842)	(29.435.873.433)	
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(9.718.800.332)	(30.694.918.905)	
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(14,38)	(45,41)	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)						
	MODAL SAHAM	MODAL DISETOR LAINNYA	SALDO LABA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	SALDO LABA BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	KOMPONEN EKUITAS LAINNYA	PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Saldo per 1 Januari 2020	33.800.000.000	(202.810.333)	2.450.000.000	46.198.954.544 (1.259.045.472)	-	11.097.541.715
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	19.799.191.172	(1.259.045.472)
Seorang Modal	-	-	-	-	-	-
Kerugian Belum Terealisasi atas Investasi Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	-	-	(29.439.620.000)
Keuntungan Aktuarial yang Belum Diakui	-	-	-	-	-	4.803.291
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	(1.056.724)
Saldo per 31 Desember 2020	33.800.000.000	(202.810.333)	2.450.000.000	44.939.909.072	19.799.191.172	(18.338.331.718)
Reklasifikasi Pendapatan Komprehensif Lainnya ke Laba Ditahan	-	-	-	(7.217.950.000)	-	7.217.950.000
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(4.643.580.490)	-	(4.643.580.490)
Kerugian Belum Terealisasi atas Investasi Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	-	-	(13.160.215.000)
Keuntungan Terealisasi atas Penjualan Investasi	-	-	-	-	-	8.160.335.500
Reklasifikasi Pendapatan Komprehensif Lainnya ke Laba Ditahan	-	-	-	-	-	(8.160.335.500)
Investasi Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	8.160.335.500	-	(50.293.704)
Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	-	-	-	-	-	(25.046.638)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	(25.046.638)
Saldo per 31 Desember 2021	33.800.000.000	(202.810.333)	2.450.000.000	41.238.714.082	19.799.191.172	(24.355.937.060)

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pembayaran Konsumen	2.788.154.195	3.938.007.537
Penerimaan dari Anjak Piutang	825.665.383	16.216.738.638
Penerimaan Lain-lain	474.846.267	618.810.018
Pembayaran Untuk Anjak Piutang	-	(14.500.000.000)
Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	(4.568.740.776)	(3.512.290.270)
Pembayaran untuk Pembayaran Konsumen	(616.130.000)	(1.688.051.955)
Pembayaran Pajak	(559.994.624)	(352.809.590)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(1.656.199.553)	720.404.378
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penjualan Surat Berharga	12.829.446.165	-
Pembelian Surat Berharga	(1.572.886.588)	(33.728.614.920)
Pembelian Aset tetap	(3.808.020)	-
Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas investasi	11.252.751.557	(33.728.614.920)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	20.843.332.100
Pembayaran beban penerbitan modal saham	-	(484.006.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	-	20.359.326.100
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setora Kas	9.596.552.003	(12.648.884.442)
Kas dan Setora Kas, Awal tahun	6.563.110.031	19.211.994.473
Kas dan Setora Kas, Akhir Tahun	16.159.662.034	6.563.110.031

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 dan 2020 (Dalam Rupiah)						
	MODAL SAHAM	MODAL DISETOR LAINNYA	SALDO LABA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	SALDO LABA BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	KOMPONEN EKUITAS LAINNYA	PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Saldo per 1 Januari 2020	33.800.000.000	(202.810.333)	2.450.000.000	46.198.954.544 (1.259.045.472)	-	11.097.541.715
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	-	19.799.191.172	(1.259.045.472)
Seorang Modal	-	-	-	-	-	-
Kerugian Belum Terealisasi atas Investasi Efek Tersedia Untuk Dijual	-	-	-	-	-	(29.439.620.000)
Keuntungan Aktuarial yang Belum Diakui	-	-	-	-	-	4.803.291
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	(1.056.724)
Saldo per 31 Desember 2020	33.800.000.000	(202.810.333)	2.450.000.000	44.939.909.072	19.799.191.172	(18.338.331.718)
Reklasifikasi Pendapatan Komprehensif Lainnya ke Laba Ditahan	-	-	-	(7.217.950.000)	-	7.217.950.000
Rugi Tahun Berjalan	-	-	-	(4.643.580.490)	-	(4.643.580.490)